**VICARA: Jurnal Ilmu Komunikasi**
Volume 2, Number 3, 2026 pp. 1-9
Open Access: https://e-journal.samsarainstitute.com/vjik/index

# RESPONS PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO TERHADAP KRITIK PAKAR DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

**Oleh:**
**Muhammad Fikri[1], Nabila Tiara Hazari[2], Berliana Desriyanti[3], Ikhsan Ahmad[4]**
[1,2,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1]Email: muhammadfikri14092006@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**Article History:**
Naskah Masuk : 3 Juli 2026
Naskah Direvisi : 19 Agustus 2026
Naskah Disetujui : 15 September 2026
Tersedia Online : 30 September 2026

***Keywords:***
*response to criticism, political communication, deliberative democracy, public sphere, freedom of expression*

**Kata Kunci:**
respons terhadap kritik, komunikasi politik, demokrasi deliberatif, ruang publik, kebebasan berpendapat

*This is an open access article under the* CC BY. SA

*Copyright © 2026 by Author. Published by Samsara Publishing House*

***A B S T R ACT***

*Expert criticism is one of the forms of public oversight that sustains the quality of a democracy, and the way those in power respond to it shapes the space for dissent. This study examined how President Prabowo Subianto responded to expert criticism in a speech delivered at the 28th anniversary celebration of the National Mandate Party in Jakarta on 18 September 2026, which included the phrase "saking pintarnya jadi goblok" (so clever that they become stupid). The study used a descriptive qualitative single case design. Data consisted of media reports of the speech, which were triangulated across outlets, and scholarly literature on government communication. Fairclough's three-dimensional critical discourse analysis was applied to the text, discursive practice, and social practice, and the results were read through Habermas's concepts of the public sphere, deliberative democracy, and validity claims. The findings showed that the response emphasised defending the President's welfare commitment and assessing the integrity of critics, while no substantive rebuttal of specific criticism appeared in the reported excerpts. Acceptance of criticism in principle coexisted with labels aimed at the competence and motives of critics, and accusations of slander were not accompanied by examples that could be tested. The speech was delivered to a supportive party audience, and no formal restriction of expression was identified. The study concluded that the response narrowed the conditions for equal and testable communication without closing the public sphere, and it recommended data-based replies, verifiable distinctions between criticism and slander, and stronger public communication literacy among officials.*

**A B S T R A K**

Kritik pakar merupakan salah satu bentuk kontrol publik yang menopang kualitas demokrasi, dan cara penguasa meresponsnya menentukan ruang bagi perbedaan pendapat. Penelitian ini bertujuan menganalisis respons Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik pakar dalam pidato pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta pada 18 September 2026 yang memuat ungkapan "saking pintarnya jadi goblok". Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data berupa laporan media atas pidato yang ditriangulasi lintas media serta literatur ilmiah tentang komunikasi pemerintah. Analisis wacana kritis tiga dimensi

*Corresponding author
E-mail addresses: muhammadfikri14092006@gmail.com (Muhammad Fikri)

Fairclough diterapkan pada teks, praktik wacana, dan praktik sosial, kemudian hasilnya dibaca melalui konsep ruang publik, demokrasi deliberatif, dan klaim validitas Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons presiden menekankan pembelaan atas komitmen kesejahteraan dan penilaian terhadap integritas pengkritik, sedangkan bantahan substantif atas kritik tertentu tidak ditemukan pada kutipan yang dilaporkan. Penerimaan terhadap kritik secara prinsip berdampingan dengan pelabelan atas kompetensi dan motif pengkritik, dan tuduhan fitnah tidak disertai contoh yang dapat diuji. Pidato disampaikan kepada audiens partai yang suportif, dan tidak ditemukan pembatasan formal atas kebebasan berpendapat. Penelitian menyimpulkan bahwa respons tersebut mempersempit syarat komunikasi yang setara dan dapat diuji tanpa menutup ruang publik, serta merekomendasikan jawaban berbasis data, pembedaan kritik dan fitnah yang dapat diverifikasi, dan penguatan literasi komunikasi publik pejabat.

## I. PENDAHULUAN

Demokrasi tidak berhenti pada pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga diukur dari keterbukaan penguasa terhadap kritik, jaminan kebebasan menyampaikan pendapat, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan. Dalam gagasan demokrasi deliberatif, legitimasi tidak terletak pada fakta bahwa mayoritas telah diraih, melainkan pada cara meraihnya secara adil melalui pengujian diskursif oleh publik (Muttaqien & Ramdan, 2023). Tekanan dan kritik publik pun dipahami sebagai bagian inheren dari tata kelola demokratis, yakni pertanggungjawaban yang digerakkan dari bawah (Sulistiawati & Afrilia, 2026). Kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Pengalaman Orde Baru, ketika kritik disempitkan melalui perizinan penerbitan, pembredelan, dan sensor, menunjukkan bahwa ruang kritik adalah syarat demokrasi yang mudah tergerus (Ariwianto, 2023).

Dalam ruang publik, pakar menempati kedudukan khusus sebagai aktor yang memberi evaluasi, kritik, dan masukan atas kebijakan pemerintah berdasarkan pengetahuan atau keahlian tertentu. Kritik berbasis keahlian membantu mengubah keresahan publik menjadi argumen yang dapat diuji sehingga memperkaya proses pertimbangan kebijakan. Media massa menjadi saluran yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, dan pengkritik sekaligus menjalankan fungsi pengawasan (Fermana & Zetra, 2022). Kajian atas krisis komunikasi pemerintah pada 2025 menunjukkan bahwa ketika kritik dijawab dengan klarifikasi administratif yang defensif dan minim empati, jarak antara negara dan warga justru melebar (Praba dkk., 2026; Wahyudi, 2025).

Fenomena yang menjadi kasus dalam artikel ini muncul pada 18 September 2026. Dalam pidato pada perayaan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya mewujudkan Indonesia sejahtera tanpa kelaparan, lalu menyinggung para pakar yang mengkritiknya dengan ungkapan "saking pintarnya jadi goblok" (IDN Times, 2026). Ia juga menyebut ada pakar yang melontarkan fitnah, mengutip ayat Al-Qur'an tentang fitnah,

menyatakan akan memaafkan jika pakar tersebut sadar, dan mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual (iNews, 2026; InvestorTrust, 2026). Pernyataan itu ditujukan kepada "beberapa pakar" tanpa menyebut nama atau isi kritik tertentu. Audiens yang sebagian besar kader PAN menyambutnya dengan sorakan dukungan (IDN Times, 2026). Di ruang publik, pernyataan tersebut memunculkan tanggapan kritis, antara lain tulisan opini yang menilainya sebagai tanda sikap kurang terbuka terhadap data dan pandangan yang berbeda (Good News From Indonesia, 2026). Presiden sendiri disebut memperkirakan potongan pernyataannya akan diulang-ulang di ruang publik (Okezone, 2026a).

Respons seorang kepala negara terhadap kritik menarik dikaji karena bahasa pejabat tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk persepsi dan menetapkan batas legitimasi pihak lain. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa diksi yang merendahkan atau teknokratis dapat dibaca sebagai kekerasan simbolik dan mempertebal ketidakpercayaan (Nurdin dkk., 2026; Wahyudi, 2025), dan bahwa pelabelan atas kelompok kritis dapat dimaknai sebagai upaya delegitimasi (Rahman dkk., 2026). Posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, ditambah daya jangkau media dan media sosial, membuat setiap ucapannya berpengaruh pada ruang bagi perbedaan pendapat dan kualitas dialog publik. Namun, kajian-kajian tersebut berfokus pada krisis, bencana, atau pelabelan terhadap pers; respons presiden terhadap kritik yang datang secara khusus dari pakar belum banyak dikaji. Inilah kesenjangan literatur yang hendak diisi artikel ini.

Karena itu, fenomena ini perlu ditelaah secara akademik tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut merupakan pelanggaran demokrasi. Presiden pun memiliki hak berpendapat dan membela diri, dan pidato dalam forum partai merupakan orasi politik, bukan forum deliberasi. Penilaian harus bertumpu pada konteks, isi pernyataan, dan prinsip demokrasi yang relevan. Motivasi penulis adalah memastikan bahwa perdebatan atas pernyataan ini tidak berhenti pada kecaman atau pembelaan, tetapi memperoleh pembacaan yang terukur.

Sebagai solusi, penelitian ini memadukan analisis wacana kritis tiga dimensi Fairclough (2013) dengan kerangka demokrasi deliberatif Habermas. Habermas menempatkan demokrasi sehat pada tiga prinsip, yakni deliberasi, *reasonableness* atau kesediaan memahami pihak lain, dan kebebasan yang setara, serta menilai kualitas komunikasi melalui empat klaim validitas: kebenaran, ketepatan, ketulusan, dan komprehensibilitas (Muttaqien & Ramdan, 2023). Dari sisi komunikasi pemerintah, respons terhadap kritik dinilai dari transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap umpan balik (Aprilia & Nurchotimah, 2022; Soeltanto, 2025). Tujuan penelitian ini adalah memetakan cara kritik pakar diposisikan dalam pidato presiden, membedakan tanggapan atas isi kritik dari penilaian atas pribadi pengkritik, dan menilai respons tersebut dalam perspektif demokrasi, kebebasan berpendapat, serta ruang publik Habermas.

Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis dengan menunjukkan penerapan kerangka Habermas pada respons pemimpin terhadap kritik berbasis keahlian, dan secara praktis dengan memberi implikasi bagi komunikasi pemerintah yang lebih dialogis, berbasis data, dan menghargai peran pakar sebagai bagian dari ruang publik.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Objek material penelitian adalah pidato Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT ke-28 PAN, 18 September 2026, sebagaimana dilaporkan media daring. Objek formalnya adalah pola respons terhadap kritik pakar yang dibaca dalam perspektif demokrasi, kebebasan berpendapat, dan ruang publik Habermas.

Data primer berupa kutipan pidato dalam laporan media daring arus utama yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah tentang komunikasi pemerintah, komunikasi krisis, dan kebebasan pers. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan kutipan yang sama lintas media dan hanya memakai kutipan yang konsisten pada lebih dari satu sumber (Tabel 1).

**Tabel 1. Sumber Data Utama**

| No | Sumber | Tanggal | Kegunaan analisis |
|---|---|---|---|
| **1** | IDN Times, "Tak Peduli Kritik Pakar, Prabowo: Saking Pintarnya, Jadi Goblok" | 18 Sep 2026 | Kutipan inti, konteks acara, reaksi audiens |
| **2** | iNews dan Okezone, laporan pidato HUT ke-28 PAN | 18–19 Sep 2026 | Triangulasi kutipan tentang fitnah, pemaafan, dan prediksi pemotongan pidato |
| **3** | InvestorTrust dan Akurat, laporan pidato HUT ke-28 PAN | 18–19 Sep 2026 | Triangulasi kutipan; kehadiran tokoh dan suasana forum |
| **4** | Good News From Indonesia (opini) | 2026 | Contoh tanggapan publik; diperlakukan sebagai opini, bukan data empiris |

*Sumber: olahan penulis.*

Teknik analisis data memakai analisis wacana kritis Fairclough (2013) pada dimensi teks (diksi dan modalitas), praktik wacana (produksi, distribusi, dan konsumsi pesan), dan praktik sosial (relasi kuasa dan konteks politik). Respons presiden dikategorikan ke dalam tiga bentuk: argumentasi substantif atas isi kritik, penilaian terhadap pengkritik, dan pembelaan atas komitmen atau kebijakan. Hasilnya dibaca dengan lensa demokrasi deliberatif dan klaim validitas Habermas. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dianalisisnya transkrip atau rekaman utuh pidato, serta tidak teridentifikasinya pakar maupun kritik spesifik yang dituju, sehingga temuan dibatasi pada bagian pidato yang dilaporkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Situasi ketika Pernyataan Disampaikan

Pidato disampaikan pada Jumat malam, 18 September 2026, di JICC, Senayan, dalam puncak perayaan HUT ke-28 PAN. Acara dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan pimpinan sejumlah partai (InvestorTrust, 2026). Forum ini bersifat partisan dan akrab; presiden menyapa hadirin sebagai kawan seperjuangan dan membuka dengan kelakar tentang panggilan untuk dirinya. Sejumlah media juga melaporkan bahwa presiden berpidato tanpa teks.

Alur retorika pidato dapat dirangkum dalam empat langkah. Pertama, presiden menegaskan sumpah dan komitmen mewujudkan Indonesia sejahtera, tanpa orang lapar dan tanpa anak stunting. Kedua, ia menyinggung pakar yang menurutnya menganggap diri

pakar. Ketiga, ia membingkai sebagian kritik pakar sebagai fitnah dengan rujukan religius. Keempat, ia menutup dengan pemaafan bersyarat dan nasihat kejujuran intelektual. Setelah ungkapan tentang pakar, kader PAN meneriakkan nama presiden (IDN Times, 2026). Konteks ini penting: respons disampaikan kepada audiens yang suportif, bukan kepada pengkritik.

### 3.2 Kritik Pakar yang Menjadi Konteks Pernyataan

Laporan media hanya menyebut bahwa pakar "kerap memberikan kritik terhadap sejumlah program pemerintahan" (Okezone, 2026b), tanpa mengidentifikasi nama pakar, isi kritik, atau media tempat kritik itu disampaikan. Presiden sendiri menyatakan tidak mempersoalkan kritik, tetapi menilai sebagian di antaranya sebagai fitnah, tanpa memberi contoh. Konsekuensi analitisnya jelas: tidak dapat diverifikasi apakah kritik yang dimaksud berbasis data dan argumen ataukah memuat tuduhan yang tidak berdasar. Tema pidato (kelaparan dan gizi anak) menunjukkan kaitan dengan agenda kesejahteraan pemerintah, tetapi hubungan dengan kritik tertentu tidak dinyatakan dan karenanya tidak disimpulkan di sini. Ketiadaan rujukan ini merupakan temuan tersendiri, sebab dalam ruang publik deliberatif kritik dan jawabannya semestinya dapat dipertemukan pada objek yang sama.

### 3.3 Cara Kritik Diposisikan dalam Pernyataan Presiden

Analisis teks memperlihatkan empat pemosisian kritik. Pertama, pengakuan formal: presiden disebut tidak mempermasalahkan kritik. Kedua, pembingkaian ulang kritik sebagai fitnah yang diperkuat rujukan keagamaan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembingkaian moral-religius memindahkan perdebatan dari ranah benar-salah data ke ranah baik-buruk niat. Ketiga, pelabelan atas kompetensi dan motif pengkritik, yakni ungkapan "goblok" dan pernyataan "apalagi kalian mengabdi kepada kepentingan bangsa lain" (iNews, 2026). Keempat, pemaafan bersyarat yang menempatkan presiden pada posisi moral lebih tinggi sebagai pihak yang dirugikan.

**Tabel 2. Analisis Tiga Dimensi Fairclough atas Pidato**

| Dimensi | Temuan |
|---|---|
| **Teks** | Diksi bernada menilai ("goblok", "fitnah") menggantikan diksi argumentatif; terdapat rujukan religius; sasaran dirujuk umum ("beberapa pakar") sehingga tidak dapat diuji; modalitas pemaafan dan nasihat menegaskan posisi moral pembicara. |
| **Praktik wacana** | Diproduksi secara lisan dalam forum partai, dikonsumsi dua kali: oleh audiens langsung yang menyambut positif dan oleh publik luas melalui media. Potongan kalimat tertentu menjadi judul berita, sebagaimana diantisipasi presiden sendiri (Okezone, 2026a). Kondisi ini sejalan dengan *headline syndrome*, yakni kecenderungan pembaca lebih memperhatikan judul daripada isi (Fermana & Zetra, 2022). |
| **Praktik sosial** | Relasi tidak seimbang antara presiden, yang memegang kekuasaan eksekutif dan otoritas simbolik, dan pakar yang hanya memiliki otoritas pengetahuan. Dukungan koalisi partai dalam forum tersebut memperkuat posisi tafsir presiden atas kritik. |

*Sumber: olahan penulis berdasarkan Fairclough (2013) dan laporan media.*

### 3.4 Argumentasi Substantif, Penilaian terhadap Pengkritik, atau Pembelaan

Berdasarkan kutipan yang dilaporkan, respons presiden lebih banyak berisi pembelaan atas komitmen dan penilaian terhadap pengkritik daripada argumentasi substantif. Bagian terpanjang pidato memaparkan sumpah dan cita-cita kesejahteraan, yang bernilai sebagai pernyataan visi tetapi bukan jawaban atas dalil kritik tertentu. Tidak

ditemukan, dalam bagian yang dilaporkan, data, kebijakan, atau argumen yang secara langsung membantah isi kritik pakar (Tabel 3).

### 3.5 Kritik terhadap Isi Kebijakan dan Kritik yang Diarahkan kepada Pribadi

Kritik terhadap isi kebijakan menilai proposisi: apakah program tepat sasaran, efektif, dan didukung data. Kritik yang diarahkan kepada pribadi menilai orangnya: kecerdasan, karakter, atau motifnya. Pembedaan ini sejalan dengan temuan Rahman dkk. (2026) bahwa penilaian atas suatu pernyataan harus memperhatikan target evaluasi, bukan hanya nada kalimatnya. Dalam pidato yang dikaji, target ungkapan presiden adalah pengkritik, bukan proposisi kritik. Hal ini menggeser objek perdebatan dari "apakah kritik itu benar" menjadi "apakah pengkritik itu layak dipercaya".

Dua catatan keberimbangan diperlukan. Pertama, apabila memang ada kritik yang memuat tuduhan tidak berdasar, menolaknya merupakan hak presiden, dan kejujuran intelektual adalah norma yang sah bagi akademisi. Persoalannya terletak pada beban pembuktian: karena kritik yang dimaksud tidak disebutkan, publik tidak dapat menguji tuduhan itu. Kedua, pola pelabelan atas kelompok kritis dengan atribut motif atau afiliasi memiliki kemiripan dengan reaksi terhadap pelabelan pers dalam kasus "londo ireng", yang dibaca publik sebagai delegitimasi kerja kritis (Rahman dkk., 2026). Kemiripan ini bersifat indikatif karena objek dan konteks keduanya berbeda.

### 3.6 Respons terhadap Kritik dalam Perspektif Demokrasi

Dalam perspektif demokrasi, setidaknya tiga hal dapat dicermati. Pertama, keterbukaan terhadap kritik. Pernyataan bahwa kritik tidak dipersoalkan bernilai positif, tetapi koherensinya diuji oleh pelabelan yang menyertainya. Kedua, akuntabilitas. Respons yang berhenti pada penegasan komitmen dan penilaian pengkritik termasuk akuntabilitas prosedural dan simbolik, belum akuntabilitas substantif yang menjawab akar persoalan (Sulistiawati & Afrilia, 2026). Ketiga, kebebasan berpendapat bersifat dua arah. Tidak terdapat indikasi dalam sumber yang dikaji adanya pembatasan hukum atau tindakan institusional terhadap pakar, berbeda dengan Orde Baru yang membungkam kritik melalui perizinan, pencabutan izin, dan sensor (Ariwianto, 2023). Karena itu, kekhawatiran yang relevan bukan represi formal, melainkan iklim komunikasi: ucapan pejabat tertinggi dapat menimbulkan efek gentar bagi pihak yang hendak berbicara, sebagaimana gejala spiral keheningan yang dibahas dalam kajian etika komunikasi pejabat (Iman dkk., 2026). Dugaan ini membutuhkan pengujian empiris, misalnya melalui wawancara dengan pakar dan akademisi.

### 3.7 Respons Presiden dalam Perspektif Ruang Publik Habermas

Pidato dalam forum partai tidak dapat dinilai dengan standar deliberasi penuh, sebab kelompok pendengar sudah condong mendukung dan tidak ada pihak yang diundang menjawab. Namun, karena pidato disiarkan dan diberitakan, dampaknya masuk ke jaringan komunikasi publik yang menurut Habermas menjadi tempat opini dibentuk (Muttaqien & Ramdan, 2023). Penilaian karenanya diarahkan pada pengaruh pidato terhadap kualitas ruang publik. Tabel 4 merangkum pembacaan atas empat klaim validitas.

**Tabel 4. Pembacaan Klaim Validitas Habermas atas Respons Presiden**

| Klaim | Pertanyaan analitis | Pembacaan |
|---|---|---|
| **Kebenaran** | Apakah tuduhan fitnah dapat diuji terhadap fakta? | Belum terpenuhi dalam bagian yang dilaporkan: tidak ada contoh kritik yang dianggap fitnah sehingga klaim tidak dapat diperiksa. |
| **Ketepatan** | Apakah ucapan sesuai norma percakapan setara? | Pelabelan "goblok" menempatkan pengkritik sebagai objek penilaian, bukan mitra bicara yang setara; bertentangan dengan prinsip *reasonableness*. |
| **Ketulusan** | Apakah ekspresi selaras dengan maksud yang dinyatakan? | Seruan kejujuran intelektual dan komitmen kesejahteraan sejalan dengan klaim ini; ketulusan tidak dapat dinilai lebih jauh dari teks. Norma kejujuran yang sama berlaku timbal balik bagi penguasa. |
| **Komprehensibilitas** | Apakah pesan jelas dan dapat dijawab? | Pesan mudah dipahami secara emosional, tetapi sasarannya tidak jelas ("beberapa pakar") sehingga sulit dijawab secara argumentatif. |

*Sumber: olahan penulis berdasarkan Muttaqien dan Ramdan (2023).*

Pola ini mendekati tindakan strategis yang berorientasi pada pembentukan simpati audiens dan penempatan lawan bicara sebagai pihak keliru, bukan tindakan komunikatif yang berupaya mencapai saling pengertian. Di sisi lain, tidak tepat menyimpulkan bahwa pidato tersebut menutup ruang publik, karena kritik pakar tetap dapat disampaikan dan memperoleh tanggapan, termasuk dari tulisan opini yang mengkritik pidato itu (Good News From Indonesia, 2026). Ruang publik tetap terbuka; yang terpengaruh adalah mutu pertukaran argumen.

### 3.8 Sintesis: Hubungan Kekuasaan, Kritik, dan Demokrasi

Sintesis temuan memperlihatkan relasi yang tidak simetris. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, otoritas simbolik, audiens loyal, dan akses media yang luas, sedangkan pakar bertumpu pada otoritas pengetahuan yang bergantung pada kepercayaan publik. Dalam relasi demikian, cara kekuasaan merespons kritik menjadi penentu kualitas demokrasi: jawaban berbasis argumen memperkuat ruang publik, sementara pelabelan atas pengkritik cenderung menggeser perdebatan ke ranah karakter dan kesetiaan.

Empat temuan pokok dapat dirumuskan. (1) Respons presiden lebih banyak berisi pembelaan komitmen dan penilaian terhadap pengkritik daripada argumentasi substantif. (2) Pengakuan formal atas kritik berdampingan dengan pelabelan yang menyasar kompetensi dan motif pengkritik. (3) Tuduhan fitnah tidak disertai rujukan yang dapat diuji sehingga sulit dijawab secara deliberatif. (4) Tidak ditemukan indikasi pembatasan formal kebebasan berpendapat, tetapi terdapat risiko pada iklim komunikasi dan kualitas dialog publik.

Implikasi bagi komunikasi pemerintah mencakup beberapa hal. Pertama, jawaban atas kritik pakar sebaiknya berbasis data dan menyebut proposisi yang dibantah, melalui juru bicara atau kanal klarifikasi kebijakan. Kedua, pembedaan antara kritik dan fitnah perlu disertai penunjukan contoh dan mekanisme verifikasi, bukan pelabelan umum. Ketiga, pejabat tinggi memerlukan penguatan literasi komunikasi publik, termasuk kesadaran bahwa ucapan spontan dalam forum partai akan dikonsumsi publik luas (Nurdin dkk., 2026). Keempat, komunikasi dua arah yang simetris perlu dilembagakan agar kritik pakar diperlakukan sebagai masukan kebijakan (Praba dkk., 2026).

## IV. SIMPULAN

Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik pakar dalam pidato HUT ke-28 PAN menampilkan komunikasi yang menegaskan komitmen kesejahteraan sekaligus menilai integritas dan kompetensi pengkritik. Berdasarkan bagian pidato yang dilaporkan, tidak ditemukan bantahan substantif atas isi kritik. Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas, pola tersebut mempersempit syarat komunikasi yang setara dan dapat diuji, meskipun seruan kejujuran intelektual selaras dengan klaim ketulusan. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pernyataan itu melanggar kebebasan berpendapat, karena tidak ada pembatasan formal yang teridentifikasi dan presiden juga memiliki hak berpendapat.

Penelitian ini terbatas pada laporan media atas satu pidato dan belum mengidentifikasi kritik pakar yang menjadi konteks. Penelitian lanjutan disarankan menganalisis transkrip atau rekaman utuh, memetakan kritik pakar yang relevan beserta tanggapan mereka, mewawancarai pakar dan akademisi untuk menguji dugaan efek gentar, serta membandingkan respons presiden terhadap kritik dalam forum partai dan forum kenegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA


Aprilia, I. A., & Nurchotimah, A. S. I. (2022). Peran komunikasi pemerintah untuk mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *COMMUNICATION, 13*(1), 70–85.

Ariwianto, E. (2023). Kebebasan pers serta kritik masyarakat dalam masa pemerintahan Orde Baru. *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya, 4*(2), 107–110. https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss2page107-110

Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.

Fermana, R. A., & Zetra, A. (2022). Relasi media massa dan politik pada pemilihan umum presiden 2019. *Jurnal Wacana Politik, 7*(1), 71–83. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.32370

Good News From Indonesia. (2026). Bangsa ini dibangun oleh pakar, dan kita masih memercayai mereka [Opini]. https://www.goodnewsfromindonesia.id/indonesiana/opini/bangsa-ini-dibangun-oleh-pakar-dan-kita-masih-memercayai-mereka

IDN Times. (2026, 18 September). Tak peduli kritik pakar, Prabowo: Saking pintarnya, jadi goblok. https://www.idntimes.com/news/indonesia/tak-peduli-kritik-pakar-prabowo-saking-pintarnya-jadi-goblok-00-rgfwk-xws2k0

Iman, F. N., Febriana, A., Natashia, A., Halim, S., & Telaumbanua, N. A. K. (2026). Analisis pelanggaran etika komunikasi pejabat publik dalam media sosial (Studi kasus: Video kontroversial Wahyudin Moridu). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(3), 1037–1042. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5385

iNews. (2026, 18 September). Prabowo kutip ayat Alquran saat cerita difitnah pakar: Lebih kejam dari pembunuhan! https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5476080/prabowo-kutip-ayat-alquran-saat-cerita-difitnah-pakar--lebih-kejam-dari-pembunuhan-

InvestorTrust. (2026, 18 September). Prabowo kutip Al-Baqarah ayat 191 untuk respons fitnah dari pihak mengaku pakar. https://investortrust.id/national/116784/prabowo-kutip-al-baqarah-ayat-191-untuk-respons-fitnah-dari-pihak-mengaku-pakar

Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep komunikasi Jurgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6*(1), 51–64.

Nurdin, H., Sari, F. M., & Lahmuddin, F. (2026). Vacuum of leadership: Analisis kegagalan komunikasi pemerintah dalam penanganan banjir Sumatera. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi, 13*(2), 91–101. https://doi.org/10.22236/komunika.v13i2.22858

Okezone. (2026a, 18 September). Prabowo sindir pakar pengkritik: Kalau punya kepintaran, jangan lupa jujur! https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5476202/prabowo-sindir-pakar-pengkritik--kalau-punya-kepintaran--jangan-lupa-jujur-

Okezone. (2026b, 19 September). Jawab fitnah pakar, Prabowo kutip Surat Al-Baqarah ayat 191. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5476082/jawab-fitnah-pakar--prabowo-kutip-surat-al-baqarah-ayat-191

Praba, A. G., Yenny, & Abror, D. (2026). Komunikasi krisis pemerintah pasca aksi massa 2025: Transparansi, koordinasi, empati, dan legitimasi politik di Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 4*(7), 2891–2898. https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3107

Rahman, A., Fahrudin, A., & Widyaningrum, Y. (2026). Sentimen publik terhadap retorika politik "londo ireng" dalam pemberitaan BBC News Indonesia. *Journal of Social and Political Science, 5*(2), 305–313.

Soeltanto, T., Utami, W., Ratu, I. P. T., & Hadiwiyono. (2025). Strategi komunikasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi pada Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang). *Jurnal Akses STIA Malang, 7*(1), 62–69.

Sulistiawati, H., & Afrilia, M. (2026). Upaya pemerintah mengelola tekanan publik: Analisis respon pemerintah atas tuntutan 17+8 pasca demonstrasi Agustus 2025. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 12*(1), 237–250.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

Wahyudi, F. S. (2025). Komunikasi pejabat publik di tengah krisis: Analisis gaya bicara dan dampaknya pada aksi demo 29–31 Agustus 2025. *Journal of International Multidisciplinary Research, 3*(9), 13–20. https://doi.org/10.62504/jimr1362